

**RESUME HASIL PENILIKAN KINERJA PHPL
PT. SENTOSA BAHAGIA BERSAMA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- I. Nama LP-PHPL : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
- a. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-015-IDN
- b. Alamat Kantor : Jl. Ciremai Raya Blok BC no. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi
- c. Telpn : 021-8844934
- d. Website dan email : sertifikasimultima.wordpress.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit : 1. Rimba Gatot Widodo, S Hut (Lead/ Auditor Sosial)
2. Amin Pujiyanto, S Hut (Auditor Prasyarat dan Produksi)
3. Erwin Iskandar, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Mansur, AMd (Auditor VLK)
- g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Dwi Harsono
- II. Nama IUPHHK-HT : PT. SENTOSA BAHAGIA BERSAMA**
1. SK IUPHHKA HA : Nomor 249/Menhut-II/2009, tanggal 24 April 2009
2. Luas Areal : ± 55.055 Ha
3. Lokasi : Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
4. Alamat Kantor : Jl. M. Isa No. 1, Palembang
5. Telpn : Telp (0711) 351987, Fax (0711) 351983
6. **Pengurus** :
- Komisaris : Kms. H. A. Halim Ali
 - Direktur Utama : Kms. H. A. Halim Ali
 - Direktur : Kms. Muhammad Umar
 - Direktur : Drs. H. Maman L, MM
7. Nomor SPHPL : IMS-SPHPL-006/Rev-1
8. Masa Berlaku : 21 Oktober 2013 – 20 Oktober 2018

I. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

No	Tahapan	Waktu dan tempat	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	28 Desember 2015 - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan - BPPHP Wilayah V, Palembang	Menyampaikan Pemberitahuan Penilikan dari Kementerian Kehutanan dan surat tugas dari lembaga sertifikasi PT. Inti Multima Sertifikasi
2.	Pertemuan Pembukaan (entry briefing)	28 Desember 2015	Acara dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen dan staff lapangan perusahaan dengan acara utama penjelasan dari tim auditor tentang pelaksanaan kegiatan Audit Tahap II, terkait

			didalamnya adalah: tujuan, ruang lingkup, metode, acuan yang digunakan, tata waktu. Acara ditutup dengan penandatanganan BAP Entry Briefing
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 Desember 2015 – 04 Januari 2016 (Kantor PT. Sentosa Bahagia Bersama)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dokumen, terutama tambahan dokumen sekunder yang tersedia di lapangan 2. Identifikasi dan telaah dokumen pada masing-masing kriteria. 3. Pengamatan lapangan pada obyek verifikasi yang memerlukan uji petik. 4. Wawancara dengan masyarakat desa sekitar untuk verifikasi silang. 5. Wawancara dengan personel unit manajemen yang bertanggung jawab 6. Wawancara dengan narasumber terkait proses verifikasi masing-masing kriteria
4.	Pertemuan Penutup Exit Briefing	4 Januari 2016 (Kantor PT. Sentosa Bahagia Bersama)	<p>Pertemuan dihadiri oleh tim auditor dan pihak manajemen serta staff perusahaan. Agenda acara adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paparan hasil temuan verifikasi lapangan untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh kedua belah pihak 2. Penandatanganan lembar periksa dan verifikasi lapangan 3. Penandatanganan berita acara penilaian lapangan 4. Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara exit briefing
5.	Pengambilan Keputusan	08 Februari 2016 (Kantor PT. Inti Multima Sertifikasi)	Dilaksanakan setelah hasil penilaian selesai disusun oleh Tim Audit. Keputusan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.

II. Resume Hasil Penilaian PHPL-VLK

2.1 Resume Hasil Penilaian PHPL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1.1 Sedang (2)	1.1.1	Baik	Dokumen legal dan administrasi tata batas sudah lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
	1.1.2	Sedang	Realisasi penataan batas yang telah dilaksanakan pada areal kerja IUPHHK-HTI PT. SBB mencapai sepanjang 94,59 km dari panjang batas keseluruhan 308 km atau 30,71% dan ada bukti upaya PT. Sentosa Bahagia Bersama untuk melaksanakan tata batas pada areal yang belum ditata batas dan rekonsruksi batas yang dilakukan oleh pemegang izin sebelumnya agar tata batas bisa temu gelang (100%).
	1.1.3	Sedang	Terdapat konflik batas dengan pihak lain terkait dengan eksistensi areal IUPHHK-HT PT. Sentosa Bahagia Bersama, baik dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya dan telah menyusun dokumen SOP tentang mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat. PT. Sentosa Bahagia Bersama membuat laporan penyelesaian konflik jika terjadi konflik saja.
	1.1.4	n.a	Terdapat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil telaah dokumen dan Peta diketahui tidak terdapat perubahan fungsi di areal kerja PT. SBB. Dengan demikian Verifier ini tidak relevan.
	1.1.5	Sedang	Terdapat kegiatan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di areal kerja IUPHHK-HTI PT. Sentosa Bahagia Bersama dalam bentuk Penggunaan izin pinjam pakai untuk eksplorasi bahan galian batubara oleh PT Sentosa Kurnia Energi dan Perambahan hutan. PT. Sentosa Bahagia Bersama sudah melakukan pendataan dan upaya penyelesaiannya (khusus untuk perambahan hutan), tetapi belum melakukan tindakan pelaporan secara intensif kepada instansi yang terkait.
1.2 Sedang (2)	1.2.1	Baik	Tersedia dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL.
	1.2.2	Baik	Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin dan masyarakat serta terdapat bukti pelaksanaan (Berita Acara).

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	1.2.3	Sedang	Terdapat realisasi sebagian dari kegiatan-kegiatan prasyarat, kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial terdapat kegiatan yang realisasinya belum mencapai 100% baik realisasi fisik. Selain itu rencana alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak dilakukan, sehingga tidak dapat diketahui tingkat realisasi anggaran setiap tahunnya.
1.3 Sedang (2)	1.3.1	Buruk	Keberadaan tenaga sarjana kehutanan dan tenaga teknis kehutanan di PT. Sentosa Bahagia Bersama belum terdapat pada setiap bidang. Bahkan keberadaan GANIS masih di bawah ketentuan yang ada. PT. Sentosa Bahagia Bersama telah memiliki sarjana kehutanan cukup dari yang dipersyaratkan, tetapi untuk keberadaan GANIS ada bidang yang belum memiliki GANIS-PHPL, Timber Cruising, Pembukaan Wilayah Hutan, Kelola Lingkungan dan Kelola Sosial.
	1.3.2	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. Sentosa Bahagia Bersama adalah 70 %.
	1.3.3	Sedang	Dokumen ketenagakerjaan tersedia tidak lengkap. Dokumen yang tersedia diantaranya dokumen Peraturan Perusahaan, dokumen SK pengangkatan karyawan, dokumen Surat Perjanjian Kerja, SOP Penerimaan Tenaga Kerja Baru, Surat Edaran tentang pemberian kebebasan kepada seluruh karyawan/karyawati di lingkungan perusahaan PT Sentosa Bahagia Bersama untuk membentuk Serikat Pekerja dan Dokumen Lembar Evaluasi Kinerja Karyawan.
1.4 Sedang (2)	1.4.1	Sedang	Tersedia struktur organisasi, tetapi tidak mempunyai <i>job discriptionnya</i> . Struktur organisasi PT. Sentosa Bahagia Bersama sebagian sudah sesuai kerangka PHPL walaupun belum sempurna (keseluruhan).
	1.4.2	Baik	PT. Sentosa Bahagia Bersama sudah memiliki perangkat SIM, baik perangkat fungsional maupun perangkat fisik. Untuk ketersediaan perangkat fisik, PT. Sentosa Bahagia Bersama sudah memiliki perangkat lunak maupun perangkat keras. PT. Sentosa Bahagia Bersama juga sudah memiliki tenaga pelaksana untuk masing-masing perangkat.
	1.4.3	Sedang	PT. Sentosa Bahagia Bersama tidak mempunyai struktur SPI/Internal Auditor. Tetapi sebagian fungsinya sudah diimplementasikan oleh bagian Cek Rule, walaupun belum

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			mencakup seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan
	1.4.4	Sedang	Terdapat sebagian bukti kegiatan sebagai tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Tetapi kegiatan itu tidak bersifat menyeluruh, tetapi hanya pada kegiatan produksi dan pengamanan hutan.
1.5 Sedang (2)	1.5.1	Sedang	Pelaksanaan sosialisasi kegiatan IUPHHK-HT PT. SBB tentang kewajiban perusahaan sebagai pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu – HTI dan perencanaan kegiatan operasional pada tahun RKT mendatang tidak dilakukan secara baik dan terstruktur. Sosialisasi yang ada dilakukan sangat sedikit terhadap kalangan tertentu
	1.5.2	Sedang	Terdapat dokumen laporan Penataan Batas dan disahkan oleh instansi terkait serta terdapat tanda tangan dari petugas kecamatan dan petugas kampung sekitar. Terdapat juga Berita Acara Persetujuan Pengukuran dan Pemancangan Pal Batas Persekutuan IUPHHK-HT PT. Sentosa Bahagia Bersama dengan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia di desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang di dalamnya diketahui sudah mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat desa Sako Suban.
	1.5.3	Sedang	Terdapat realisasi pelaksanaan CSR yang didasarkan atas proposal kegiatan yang diajukan oleh masyarakat yang meliputi Kepala Desa, Polisi (pada pembangunan pos polisi), Tokoh Agama dan Petani.
	1.5.4	Sedang	Rencana kawasan lindung sudah ditetapkan dalam RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI tahun 2015 PT. Sentosa Bahagia Bersama yang sudah disetujui oleh instansi Kehutanan. Tetapi hanya sebagian kecil rencana kawasan lindung yang direalisasikan, dan tidak diketahui adanya persetujuan dari masyarakat sekitar hutan
2.1 Baik (3)	2.1.1	Baik	Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB /survei potensi/risalah/landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar. Dalam penyusunan RKUPHHK telah mempertimbangan deliniasi mikro.
	2.1.2	Baik	PT. SBB telah mengimplementasikan penataan areal kerjanya di lapangan dengan membuat batas Blok/Petak berupa jalan dan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			terdapat pemasangan pal batas serta plang identitas Blok/Petak.
	2.1.3	Sedang	Tanda batas blok dan petak (jalan, pal dan identitas) hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2 Sedang (2)	2.2.1	Sedang	PT. SBB memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/ survei potensi/risalah/ hasil ITSP 3 tahun terakhir, namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei dan peta potensi)
	2.2.2	Sedang	PT. SBB memiliki data pengukuran riap tegakan / PSP yang meliputi jenis tanaman Karet namun untuk tanaman Jabon belum tersedia padahal terdapat jenis Jabon yang termasuk jenis tanaman pokok yang di tanam.
	2.2.3	Sedang	PT. SBB baru melakukan pengukuran PUP dan melakukan analisis terhadap riap tanaman Karet sedangkan untuk tanaman Jabon perhitungan dan analisis riap belum dilakukan. Data analisis riap tegakan tanaman Karet belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Sedangkan untuk tanaman Jabon analisis data perhitungan JTT belum dilakukan.
2.3 Sedang (2)	2.3.1	Sedang	PT SBB telah menyusun SOP untuk sebagian tahapan kegiatan sistem silvikultur hutan tanaman.
	2.3.2	Sedang	Terdapat implementasi kegiatan sistem silvikultur yang sebagian belum sesuai SOP yaitu jauhnya lokasi persemaian dengan lokasi penanaman, pembuatan jalan dengan arah tidak ke arah utara - selatan, pelaksanaan land clearing dll
	2.3.3	n.a	Berkaitan dengan operasional pengelolaan HTI PT. SBB yang baru berjalan 5 tahun (tanaman generasi pertama) sampai saat ini belum tersedia data hasil inventarisasi/ penghitungan potensi tegakan baik untuk Karet, Jabon maupun Sungkai yang merupakan tanaman pokok. Dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HT disebutkan bahwa daur tanaman pokok Karet 20 tahun, Jabon 6 tahun dan Sungkai 6 tahun. Pada umumnya kegiatan inventarisasi untuk mengetahui potensi tegakan dilakukan 2 tahun sebelum penebangan. Dengan demikian verifier ini <i>not applicable</i> (NA)
	2.3.4	Baik	Persentase tingkat hidup tanaman umur 0 - 4 tahun (sebagai permudaan tanaman) adalah 91,83 %.
2.4 Sedang (2)	2.4.1	Sedang	Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan tetapi isinya belum sesuai (minimal 50%) dengan karakteristik

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			kondisi setempat.
	2.4.2	Sedang	Penerapan teknologi tepat guna terlihat pada sebagian pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan dan sebagian pasca kegiatan (berupa evaluasi hasil tanaman) namun tidak terlihat pada tahap persiapan (perencanaan) maupun manajemen Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3).
	2.4.3	NA	Sehubungan dengan belum dilakukannya pemanenan pada Hutan Tanaman dimana saat ini baru memasuki tahun ke lima maka perhitungan pemanfaatan maksimal kayu dilakukan pada kegiatan pemanfaatan kayu di Hutan Alam. Namun demikian pada saat dilakukan verifikasi lapangan penebangan kayu dari hutan alam sudah tidak berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara penebangan sudah berakhir beberapa bulan sebelumnya. Keadaan tersebut terjadi karena tingkat okupasi yang tinggi oleh masyarakat sehingga potensi pohon yang ada telah dibalak secara tidak legal. Berdasarkan kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa perhitungan Faktor Eksploitasi (FE) tidak bisa diaplikasikan (<i>not applicable</i>)
2.5 Baik (3)	2.5.1	Sedang	Penyusunan RKT tahun 2015 didasarkan pada Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB. Seluruh dokumen perencanaan baik RKU maupun RKT yang dijadikan landasan operasional kegiatan pengelolaan hutan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat perbedaan mengenai lokasi <i>land clearing</i> dan penanaman dibanding dokumen RKUPHHK-HTI.
	2.5.2	Baik	Peta RKT tahun 2015 terdapat alokasi mengenai kawasan yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang yang meliputi Buffer Zone (warna merah), KPPN (merah), KPPS (merah) dan Sempadan Sungai seperti tertera dalam Peta RKU.
	2.5.3	Sedang	Implementasi penandaan batas pada blok dan petak tebangan dan sarana prasarana serta sebagian kawasan lindung sebagian telah sesuai dengan peta kerja yang dibuat.
	2.5.4	Sedang	Lokasi pemanenan setiap tahunnya sesuai dengan blok dan petak kerja pada dokumen rencana jangka pendek atau RKT. Namun demikian realisasi penebangan blok RKT 2014 tidak mencapai target dan terealisasi sebesar 20,44 %.
2.6.	2.6.1	Sedang	Likuiditas 15,66 %, Solvabilitas 108,84 % dan Rentabilitas 1,03.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
Buruk (1)			Kantor Akuntan Publik memberikan catatan Basis Opini Wajar dengan Pengecualian.
	2.6.2	Baik	Besarnya biaya untuk mendanai rencana kegiatan adalah sebesar Rp 100.308.320.000 sedangkan besarnya realisasi biaya kegiatan adalah sebesar Rp 94.580.983.750. Dengan demikian rencana anggaran terealisasi 94,29 %.
	2.6.3	Buruk	Secara keseluruhan dari bidang kegiatan terlihat bahwa perbedaan proporsi cukup besar yaitu sebesar 82,37 %.
	2.6.4	Sedang	Pembayaran gaji karyawan lancar namun terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktu.
	2.6.5	Sedang	Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan tanaman unggulan terhadap penyiapan lahan sebesar 80,03 % namun belum ada realisasi penanaman tanaman kehidupan dan unggulan.
	2.6.6	Buruk	Realisasi penanaman tanaman pokok sebesar 40,55 % dari yang seharusnya sedangkan penanaman tanaman kehidupan dan tanaman unggulan tidak terealisasi.
3.1 Baik (3)	3.1.1	Baik	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL- UPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH; dan sesuai dengan kondisi biofisiknya.
	3.1.2	Sedang	Kawasan yang telah ditata mencapai 82,37%.
	3.1.3	Baik	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup lebih dari 90 %
	3.1.4	Baik	Ditemukan bukti tertulis mengenai sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan masyarakat sekitar hutan yang merupakan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung.
	3.1.5	Sedang	Isi laporan Pengelolaan kawasan lindung sebagian besar telah menggambarkan kapan pembuatan kawasan lindung tersebut, bagaimana dengan pembuatan tata batas (patok, plank nama) dan jenis maupun kondisi flora dan fauna di masing-masing kawasan lindung tersebut terutama dikaitkan dengan identifikasi dan pengelolaan jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
3.2 Baik (3)	3.2.1	Baik	SOP sesuai dengan jenis gangguan yang ada

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	3.2.2	Baik	Sarana dan prasarana yang tersedia dalam upaya mencegah dan menanggulangi gangguan hutan tersedia dalam jumlah memadai dan sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.
	3.2.3	Sedang	Tenaga keamanan dan perlindungan hutan sudah tersedia Ganis PHPL Binhut namun hanya 1 orang.
	3.2.4	Baik	Implementasi perlindungan hutan telah berjalan dengan mempertimbangkan potensi gangguan yang ada dengan berbagai cara seperti penyuluhan, patroli, pemasangan papan batas, papan larangan, papan perlindungan dan tindakan pembayaran imbal jasa tanam tumbuh.
3.3 Baik (3)	3.3.1	Baik	Telah Terdapat SOP pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air
	3.3.2	Baik	Sarana pengelolaan dan pemantauan telah tersedia sesuai dengan ketentuan, dokumen perencanaan serta berfungsi dengan baik
	3.3.3	Sedang	Tersedia personil pengelolaan dan pemantauan lingkungan tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya tidak memadai
	3.3.4	Baik	Dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tersedia dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
	3.3.5	Baik	Sudah tersedia data hasil pengukuran curah hujan, SPAS dan plot erosi dari tiga distrik, data laboratorium kualitas air dan tanah. Belum ditemukan analisa hubungan antara data curah hujan, data hasil analisa laboratorium, data pengukuran SPAS dan data penghitungan erosi.
	3.3.6	Sedang	Indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air terdapat di wilayah kerja PT SBB, namun demikian terdapat upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
3.4 Sedang (2)	3.4.1	Baik	Sudah tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	3.4.2	Sedang	Implementasi identifikasi flora dan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
3.5 Baik (3)	3.5.1	Baik	Telah tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	3.5.2	Baik	Implementasi pengelolaan flora telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	3.5.3	Sedang	Ditemukan indikasi atau bukti adanya gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik berupa kebakaran hutan.
3.6 Baik (3)	3.6.1	Baik	Telah tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	3.6.2	Baik	Implementasi pengelolaan fauna telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik serta tidak ditemukan keluaran sesuai dengan SOP.
	3.6.3	Sedang	Terdapat indikasi dan bukti adanya gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.
4.1 Sedang (2)	4.1.1	Sedang	IUPHHK-HT telah memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin yaitu berupa dokumen ANDAL 2009, RKUPHHK (Revisi) periode 2010-2019, RKT 2014, Laporan Inventarisasi Lahan Suku Anak Dalam (SAD) di Suban 2015, Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT SBB September 2014. Namun data yang ada belum di-update.
	4.1.2	Sedang	Terdapat SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat dan SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat namun belum diperoleh dokumen kesepakatan dari para pihak atas mekanisme tersebut
	4.1.3	Baik	PT SBB telah memiliki mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas yaitu berupa SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SOP PMDH
	4.1.4	Sedang	IUPHHK telah melakukan penandaan batas areal kerjanya dengan lahan masyarakat berupa parit gajah namun belum dilaksanakan terhadap seluruh lahan masyarakat yang berbatasan dengan areal kerja
	4.1.5	Sedang	Terdapat persetujuan atas luas dan batas areal kerja PT SBB oleh pemerintah yang dibuktikan dengan pengesahan SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK, dan RKT. Namun belum diperoleh bukti persetujuan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			dari seluruh masyarakat sekitar areal kerja.
4.2 Sedang (2)	4.2.1	Baik	PT SBB telah memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial berupa RKL-RPL, RKUPHHK, RKTUPHHK-HTI 2015 dan RO Kelola Sosial 2015. Dokumen perencanaan tersebut telah mencakup seluruh tanggung jawab sosial perusahaan.
	4.2.2	Baik	Terdapat SOP yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yaitu berupa SOP PMDH dan SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan
	4.2.3	Sedang	IUPHHK telah melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH melalui kegiatan sosialisasi RKT, visi misi dan batas arealkerja. Namun kegiatan tersebut belum dilakukan terhadap Desa Ulak Embacang dan Desa Bayat Ilir
	4.2.4	Sedang	PT SBB telah merealisasikan 7 kegiatan dari 13 yang direncanakan (53,8%) berupa pelibatan masyarakat dalam kegiatan IUPHHK, pembangunan sarana prasarana desa, sekolah, peribadatan, olah raga; perbaikan jalan, pelatihan tenaga pengamanan, pembagian hewan kurban, paket sembako, honor guru & beasiswa
	4.2.5	Sedang	Tersedia laporan/dokumen sebanyak 6 (enam) kegiatan dari 8 (delapan) kegiatan (75%) pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin selama periode setahun terakhir berupa: Dokumentasi Kegiatan CSR Tahun 2015, RKT 2015, Daftar Tenaga Kerja PT SBB per Nopember 2015, Berita Acara Serah Terima Qurban dan Sembako, Daftar Penerima Honor Guru & Beasiswa Ponpes Rhaudatul Thalibin Dayung, Surat Perintah Kerja Borongan Pemeliharaan Tanaman.
4.3 Sedang (2)	4.3.1	Sedang	Terdapat data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang mencakup seluruh desa binaan PT SBB berupa dokumen ANDAL, RKUPHHK, Laporan Deliniasi Mikro, dan Daftar Karyawan Lokal per Nopember 2015. Namun data tersebut belum dimutakhirkan dan tidak lengkap.
	4.3.2	Sedang	PT. SBB telah memiliki SOP mengenai peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang telah mencakup 2 (dua) dari 3 (tiga) kewajibannya (66,67%) yaitu SOP Meningkatkan Akses

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			Masyarakat Ke Dalam Hutan dan SOP PMDH
	4.3.3	Sedang	Terdapat dokumen rencana kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa RKT 2015 dan RKUPHHK 2010-2019 (Revisi) yang mencakup seluruh kewajibannya namun rencana kegiatan tersebut belum diuraikan secara jelas dan lengkap dalam dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial.
	4.3.4	Sedang	Terdapat 1 (satu) implementasi dari 7 (tujuh) rencana kegiatan terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat (14,29%) yaitu berupa pelibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan hutan.
	4.3.5	Baik	IUPHHK-HT PT SBB telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik berupa Laporan Kegiatan CSR 2015 dan Daftar Karyawan PT SBB Bulan Nopember 2015.
4.4 Sedang (2)	4.4.1	Baik	Terdapat SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat yang telah disahkan oleh manajemen serta telah menguraikan potensi konflik yang ada sesuai dengan kondisi di lapangan
	4.4.2	Sedang	IUPHHK-HT PT SBB telah membuat peta konflik setiap distrik dengan menggambarkan areal-areal klaim lahan oleh masyarakat sekitar namun belum jelas claimer dan luasannya
	4.4.3	Sedang	Terdapat kelembagaan resolusi konflik namun belum melibatkan pihak eksternal (adat atau pemerintahan setempat-kecamatan/desa) serta tidak tersedia dana khusus untuk pengelolaan konflik
	4.4.4	Sedang	Terdapat permasalahan antara masyarakat dengan IUPHHK-HTI PT SBB selama masa kegiatan operasi, namun proses penyelesaiannya tidak terdokumentasi seluruhnya.
4.5 Sedang (2)	4.5.1	Sedang	IUPHHK-HTI PT SBB telah merealisasikan 5 (lima) dari 7 (tujuh) sarana hubungan industrial dengan karyawannya (71%) melalui organisasi pengusaha, keberadaan dokumen PP, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat bagi karyawan, SPK, dan peraturan ketenagakerjaan.
	4.5.2	Sedang	IUPHHK-HTI PT. SBB pada tahun 2015 telah membuat rencana pengembangan kompetensi karyawan dan terealisasi 70%. Terdapat bukti kegiatan pelatihan berupa surat keterangan,

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			laporan maupun dokumentasi.
	4.5.3	Sedang	Tersedia standar jenjang karir dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan telah diatur lebih lanjut dalam Form Penilaian Prestasi. Promosi ditetapkan melalui SK Direksi. Standar tersebut sebagian telah diimplementasikan kepada seluruh karyawan.
	4.5.4	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu PP dan telah diimplementasikan seluruhnya

2.2 Resume Hasil Penilaian VLK

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Keterpenuhan	Ringkasan Penilaian
1	1.1	1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT. SBB mendapat SK IUPHHK-HT No. 249/Menhut-II/2009 tanggal 24 April 2009 dengan luas 55.055 ha yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan dan telah dilampiri peta areal kerja skala 1:100.000
			1.1.1 b	Memenuhi	IUPHHK-HT PT. SBB telah memenuhi kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan
			1.1.1 c	Memenuhi	Di dalam areal IUPHHK-HT PT. Sentosa Bahagia Bersama terdapat penggunaan kawasan diluar kegiatan IUPHHK yaitu : - PT. Sentosa Kurnia Energi Bahagia yang telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 29/1/PP-PKH/PMDN/2015 tanggal 22 April 2015. PT. Karya Perintis Sejati yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.864/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Operasi Produksi kepada PT.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Keterpenuhan	Ringkasan Penilaian
					Karya Perintis Sejati, di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan seluas 1.532,96 Ha (seribu lima ratus tiga puluh dua dan Sembilan puluh enam perseratus) Hektar.
2	2.1	2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	Terdapat dokumen perencanaan yang lengkap berupa RKUPHHK-HT berdasarkan IHMB periode 2010 - 2019, RKTUPHHK-HT tahun 2014 dan RKTUPHHK-HT tahun 2015 beserta peta lampirannya dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
			2.1.1 b	Memenuhi	PT. SBB telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK 2014 dan RKTUPHHK 2015 berupa BZ hutan lindung, KPPN, KPSL, dan sempadan sungai dan terbukti adanya di lapangan.
			2.1.1 c	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan RKT 2014 dan 2015 telah disahkan oleh pihak yang berwenang, posisi batas blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan.
	2.2	2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	PT. SBB telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI periode 2010-2019 berbasis IHMB yang lengkap sesuai ketentuan dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan.
			2.2.1 b	Memenuhi	Lokasi dan volume pemanfaatan kayu pada areal penyiapan lahan tahun 2014 dan 2015 adalah sesuai
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	Memenuhi	Seluruh kayu yang dipanen telah dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP) oleh petugas pembuat LHP dan telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil uji petik buku ukur dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Keterpenuhan	Ringkasan Penilaian
		3.1.2	3.1.2.1	Memenuhi	Pengangkutan kayu dari TPn menuju industry (<i>sawmill</i>) seluruhnya dilindungi dokumen SKSKB yang dilengkapi DKB dan DKBK
		3.1.3	3.1.3 a	NA	IUPHHK PT. SBB sejak Desember 2014 – November 2015 tidak lagi melakukan penebangan, sedangkan sisa kayu dari RKT 2014 telah digunakan untuk keperluan sendiri (pembuatan jalan, mating-mating dan lain-lain. Sehingga ketelusuran asal usul kayu tidak dapat dilakukan.
			3.1.3 b	NA	PT. SBB selama Periode Desember 2014 – November 2015 tidak melakukan kegiatan produksi/penebangan kayu sehingga penelusuran identitas kayu di RKT 2015 tidak dapat dilakukan
		3.1.4	3.1.4.1	Memenuhi	Dokumen angkutan PT. SBB Periode Desember 2014 s.d. November 2015 adalah SKSKB yang dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) dan/atau Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) yang telah diperiksa dan disahkan oleh P2SKSKB yang berwenang.
	3.2	3.2.1	3.2.1 a	NA	PT SBB sejak bulan Desember 2014 – November 2015 tidak melakukan penebangan/produksi dan dokumen LHP Periode Desember 2014 – November 2015 adalah NIHIL
			3.2.1 b	NA	Dengan tidak adanya produksi dan tidak diterbitkannya dokumen SPP PSDH & DR maka tidak ada kewajiban pembayaran yang dilakukan.
			3.2.1 c	NA	Dengan tidak adanya produksi dan tidak diterbitkannya dokumen SPP PSDH & DR maka tidak ada kewajiban pembayaran yang dilakukan.
	3.3	3.3.1	3.3.1.1	NA	PT SBB tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau sehingga tidak memerlukan dokumen PKAPT

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Keterpenuhan	Ringkasan Penilaian
		3.3.2	3.3.2.1	NA	PT SBB tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau sehingga dalam pengangkutannya tidak menggunakan kapal
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	Memenuhi	Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan oleh pajabat yang berwenang
		4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Terdapat dokumen RKL dan RPL meliputi kawasan lindung dan areal yang tidak efektif untuk unit produksi, komponen fisik kimia, komponen biologi dan komponen sosial ekonomi dan budaya sesuai dengan yang tertuang dalam ANDAL
			4.1.2 b	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagian telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
5	5.1	5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	PT SBB telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional perusahaan yaitu PP, SOP K3, SOP P3K, dan SOP Penanganan Keadaan Darurat
			5.1.1.b	Memenuhi	Peralatan K3 tersedia di lokasi Camp distrik dan berfungsi dengan baik
			5.1.1 c	Memenuhi	telah memiliki catatan kerja bagi karyawannya dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja
	5.2	5.2.1	5.2.1.1	Memenuhi	Terdapat Surat Edaran PT SBB yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan PT SBB memberikan kebebasan berserikat kepada karyawan/ karyawan di lingkungan perusahaan PT SBB
		5.2.2	5.2.2.1	Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1993/SK/NAKERTRANS/2015 tanggal 30 September 2015, dengan masa berlaku mulai tanggal 30 September

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Keterpenuhan	Ringkasan Penilaian
					2015 sampai dengan 29 September 2017
		5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	Berdasarkan telaah dokumen tenaga kerja PT SBB (sampai dengan bulan November 2015) dan hasil wawancara serta verifikasi di lapangan tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur.